

Paman Birin Ingatkan Peran Sentral Camat, Dana Desa Hingga Bencana Dibahas



Sumber gambar:
Adpim, pojokbanua

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan se-Kalsel Tahun 2023 bersama seluruh camat dari 156 kecamatan. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (24/10/2023). Acara ini dibuka Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan. Dalam sambutan tertulisnya, rapat koordinasi ini disebut merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Dengan fokus khusus, pada peran penting yang diemban oleh para camat di wilayah Kalsel.

“Peran camat sangat penting. Mengingat, tanggung jawab mereka yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Rapat ini diharapkan, mampu menjadi sarana untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan peran, serta fungsi dari para camat,” katanya. Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi para camat dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka sangat kompleks. Seperti kendala administratif, hambatan struktural maupun berbagai permasalahan lain yang menghambat optimalisasi peran camat. Terlebih, fenomena digitalisasi layanan publik dalam sektor pemerintahan yang semakin mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi, juga menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

“Perlu upaya terintegrasi dan komprehensif dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam segala aspek, mulai dari keuangan hingga waktu pelayanan,” ucapnya. Paman Birin menjelaskan, salah satu isu aktual yang

perlu mendapat perhatian adalah terkait pelaksanaan dana desa dan dana kelurahan yang mengamanatkan camat sebagai Pembina dan Pengawas (Binwas) dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Dari hal tersebut, aspek yang menjadi perhatian adalah fungsi pembinaan dan pengawasan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali mekanisme pembiayaan dalam kerangka pembinaan dan pengawasan ini,” ungkapnya.

Selain itu, situasi dan kondisi di Kalsel. Camat juga sering dihadapkan pada isu kompleks terkait penanganan bencana di wilayah kerja masing-masing. Namun, seringkali terjadi ketidakjelasan terkait delegasi kewenangan dalam hal ini, sementara koordinasi tumpuan penanganan bencana berada di tingkat kecamatan. “Untuk itu, diperlukan definisi dan penafsiran yang jelas mengenai peran serta tanggung jawab dalam penanganan bencana. Penguatan wewenang yang mendukung kinerja para camat,” bebernya.

Menurutnya, guna menyongsong tahun politik tahun 2024, peran camat dalam mengawasi proses demokratisasi juga sangat penting dan para camat diharapkan dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. “Kita tidak menginginkan ada kejadian atau laporan terkait keterlibatan camat dalam keberpihakan politik yang dapat merusak integritas pemerintahan daerah,” pesannya.

Ia berharap, mempertimbangkan isu-isu tersebut diperlukan komitmen untuk bekerja sama guna membangun strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. “Sinergi dan koordinasi yang baik di antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan, dalam memastikan bahwa peran camat sebagai ujung tombak pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, M. Fitri Hernadi menyebut, rakor ini dilaksanakan guna meningkatkan efektifitas kinerja pemerintah daerah. Dengan fokus khusus pada peran penting yang diemban oleh para camat.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hj Raudatul Jannah disela workshop menyerahkan penghargaan kepada Kepala Dinas PMD HSS, Kabupaten Banjar dan Kepala Dinas PMD Kabupaten HSU (foto:mb/adpim)KANDANGAN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mengingatkan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan, SH, pada pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan, di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), di Kandangan, Senin (24/7). Disampaikan Paman Birin, sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat untuk bangsa yang maju.

Paman Birin juga menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar, hal itu terlihat dari alokasi dana desa dari tahu ke tahun bertambah meningkat. Dana desa ini telah meningkatkan pembangunan di pedesaan.

Melalui dana desa, ungkap Paman Birin, ribuan kilometer jalan desa, ribuan meter jembatan, ratusan unit BUMDES, posyandu dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalsel. Namun demikian, kata Paman Birin, disisi lain beberapa kasus penggunaan dana desa juga pernah terjadi yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di pedesaan. “Saya kira kontrol terhadap penggunaan keuangan dana desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan perlu dijalankan secara cermat, akurat dan konsisten, oleh pihak-pihak yang berwenang,” terang Paman Birin.

Paman Birin juga mengingatkan, agar pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahan. Pemerintahan desa kiranya tanggap terhadap setiap aspirasi masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan, benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan sesuai kutuhan masyarakat. Disamping itu, pengelolaan pembangunan secara partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk upaya konkrit dalam mengelola program-program pembangunan di desa. “Saya berharap semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, menjadi suatu keharusan yang ditumbuhkembangkan di seluruh lingkup kehidupan masyarakat di pedesaan,” katanya.

Paman Birin mengajak seluruh pemerintahan desa menyatukan tekad, langkah dan gerak, demi memantapkan wilayah desa sebagai bagian terdepan dalam pembangunan di banua. Diketahui, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan.”

Selaku penyelenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap menyampaikan alasan Kabupaten HSS menjadi tuan rumah kegiatan workshop ini, karena HSS selalu menjadi unggulan dan alasan kedua karena ingin mengubah HSS yang merupakan learning organization menjadi teaching organization. Sementara itu, Bupati HSS, H Achmad Fikry mengungkapkan bahwa Kabupaten HSS terdiri atas 144 desa yang terbagi dalam 11 kecamatan dan dari jumlah tersebut, 20 desa sudah menjadi desa mandiri, 92 desa maju dan 32 desa merupakan desa berkembang.

Sejak tahun 2021, di Kabupaten HSS sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. “Melalui kegiatan workshop yang dilaksanakan di tempat ini, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” tuturnya.

Pada sesi diskusi dimoderatori, Sekda Kabupaten HSS, Muhammad Noor, menampilkan narasumber sebanyak lima orang yakni Anggota Komite IV DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, membahas terkait pengawasan DPR/DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa. Kemudian, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI, Iskandar Novianto membahas tentang Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Widhia Arie Prajoga Wijata membahas tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalsel diwakili Kejari HST, Faizal Banu membahas terkait Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Sekdaprov Kalsel diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pernyataan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama, kemudian diserahkan sertifikat atas tercapainya level tiga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks Kabupaten HSS tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPKP kepada Bupati HSS dan Plt Inspektur HSS.

Sumber Berita

1. <https://pojokbanua.com/paman-birin-ingatkan-peran-sentral-camat-dana-desa-hingga-bencana-dibahas/>, Paman Birin Ingatkan Peran Sentral Camat, Dana Desa Hingga Bencana Dibahas, (25/10/23)
2. <https://matabanua.co.id/2023/07/26/paman-birin-peran-desa-strategis-untuk-kemajuan-bangsa/>, Paman Birin: Peran Desa Strategis Untuk Kemajuan Bangsa, (26/07/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.